



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RUU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025--2045**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023--2024
TANGGAL 2 JULI 2024**

Tahun Sidang : 2023--2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke : 1
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 2 Juli 2024
Waktu : Pukul 10.52 WIB s.d. pukul 17.24 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2025-2045
Ketua Rapat : H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota
- 21 Hadir, 5 Ijin dari 8 Fraksi

Pemerintah

- Suharso Manoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) beserta jajaran;
- Jajaran Kemendagri; dan
- Jajaran Kemenkumham.

Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya memimpin pembahasan DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045 yang bersifat Substansi.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi bersama Pemerintah dan Komite IV DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045, menyetujui/menyepakati:

1. DIM No. 1 *disetujui* terkait judul Undang-undang;
2. DIM No. 3 *disetujui* terkait konsideran menimbang (a) terdapat frasa “visi abadi” dirubah menjadi “visi bernegara” dan terkait dengan frasa visi atau tujuan diserahkan ke ahli bahasa;
3. DIM No. 4 terkait konsideran menimbang (b) terdapat frasa “Nusantara” ... untuk *dipending*
4. DIM No. 5 terkait konsideran menimbang (c) *disetujui* sesuai usulan Fraksi PDIP;
5. DIM No. 6 terkait konsideran menimbang (d) frasa pemilihan dirubah menjadi pemilihan presiden dan pemilihan daerah dan pemilihan anggota DPR/DPRD *disetujui*
6. DIM No. 8 terkait konsideran mengingat (1) ditambahkan sesuai usulan DPD RI *disetujui*
7. DIM No. 9 terkait mengingat (2) *disetujui*
8. DIM No. 15 terkait Pasal 1 angka (1) kembali ke definisi UU No 25 Tahun 2004 *disetujui*
9. DIM No. 16 terkait Pasal 1 angka (2) terkait frasa “Indonesia Emas” perlu dicermati kembali apakah perlu ada di ketentuan umum atau tidak. *disetujui* untuk masuk ke ketentuan umum
10. DIM No. 17 *disetujui* usul PDIP
11. DIM No. 18 Pasal 1 angka (4) *disetujui* tetap
12. DIM No. 19 terkait *disetujui* tetap
13. DIM No. 20 *disetujui* Tetap
14. DIM No. 21 *disetujui* Tetap

15. DIM No. 22 *disetujui* usulan PDIP dan pedoman dirubah menjadi dasar hukum
16. DIM No. 23 *disetujui* dirubah dengan usulan rumusan baru
17. DIM No. 24 *disetujui* perubahan frasa tahunan menjadi tahun
18. DIM No. 25 *disetujui* Tetap dan akan diformulasikan kembali sesuai DIM sebelumnya
19. DIM No. 27 *disetujui* Tetap
20. DIM No. 30 *dipending* untuk menteri memberikan laporan kepada Presiden bahwa DIM ini akan dihapus
21. DIM No. 31 *disetujui* Tetap
22. DIM No. 34 *disetujui* Tetap
23. DIM No. 36 *disetujui* sesuai usulan PDIP “terdiri dari”
24. DIM No. 37 *disetujui* usulan pemerintah “dituangkan kedalam:”
25. DIM No. 38 *disetujui* harus konsisten dengan DIM sebelumnya
26. DIM No. 39 *disetujui*
27. DIM No. 42 *disetujui*
28. DIM No. 43 *disetujui* usulan pemerintah “dituangkan kedalam:”
29. DIM No. 44 *disetujui* Tetap
30. DIM No. 45 *disetujui* Tetap
31. DIM No. 46 *disetujui* Tetap
32. DIM No. 48 *disetujui* Tetap
33. DIM No. 49 *disetujui* Tetap
34. DIM No. 51 *disetujui* usulan dari PDIP (Pemerintahan diubah menjadi Pemerintah sesuai UUD 1945 alinea 4)
35. DIM No. 52 *disetujui* untuk dihapus
36. DIM No. 53 *disetujui* dirubah menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan.
37. DIM No. 54 *disetujui* dengan penambahan frasa
38. DIM No. 55 *disetujui* Tetap
39. DIM No. 56 *disetujui* Tetap dan terdiri atas menjadi terdiri dari
40. DIM No. 57 *disetujui* Tetap
41. DIM No. 58 *dipending*
42. DIM No. 59 *disetujui* Tetap dan usulan FPG penjabarannya masuk dalam penjelasan
43. DIM No. 60 *disetujui* Tetap

44. DIM No. 61 *disetujui* Tetap dan usulan FPG diadopsi ke dalam penjelasan umum
45. DIM No. 62 *disetujui* usulan FPDIP
46. DIM No. 64 *disetujui* Tetap dan usulan tambahan frasa “salah satu” setelah kata “merupakan”
47. DIM No. 66 *disetujui* Tetap
48. DIM No. 70 *disetujui* Tetap
49. DIM No. 71 *disetujui* Tetap
50. DIM No. 74 *disetujui* frasa Nusantara disesuaikan sesuai DIM sebelumnya dan ditambahkan terkait pembangunan di bidang maritim (menunggu rumusan dari pemerintah)
51. DIM No. 75 *disetujui* Tetap
52. DIM No. 76 *disetujui* Tetap
53. DIM No. 77 *disetujui* Tetap dan dimasukkan ke dalam penjelasan
54. DIM No. 78 *disetujui* Tetap

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045 diskorsing pukul 17.24 WIB dan dilanjutkan pada hari Rabu, 3 Juli 2024 pukul 10.00 WIB

Jakarta, 2 JULI 2024
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

